

ABSTRAK

PERSEPSI ELIT PARTAI POLITIK LAMPUNG TERHADAP WACANA PEMILIHAN GUBERNUR OLEH DPRD PROVINSI

Oleh

Aris Ali Ridho

Sejak diberlakukan pada 1 Juni 2005, pelaksanaan pilkada langsung selama ini masih banyak menimbulkan persoalan. Atas dasar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan wacana agar gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dikembalikan pemilihannya seperti dahulu, yaitu dipilih oleh DPRD Provinsi. Wacana tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang merupakan bagian dari revisi UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Tujuan penelitian untuk mengetahui Persepsi Elit Partai Politik Lampung Terhadap Wacana Pemilihan Gubernur Oleh DPRD Provinsi. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Persepsi Elit Partai Politik Lampung Terhadap Wacana Pemilihan Gubernur Oleh DPRD Provinsi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, tajam, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti dengan mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa enam dari sebelas elit partai politik yang diwakili oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, PKB, dan PKPB, menyatakan setuju terhadap wacana pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi. Sementara PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra, dan PPP menyatakan menolak terhadap wacana tersebut. Sedangkan PDK menyatakan netral atas wacana tersebut, karena tidak memiliki kekuatan politik di DPR RI.

Kata Kunci : Persepsi, Elite Partai Politik, DPRD Provinsi

ABSTRACT

PERCEPTIONS OF ELITE POLITICAL PARTIES IN LAMPUNG ABOUT DISCOURSE OF GOVERNOR ELECTION BY PROVINCIAL PARLIAMENT

By

Aris Ali Ridho

Since held for the first time on June 1, 2005, the implementation of direct elections still cause a lot of problem. From this problem, the government through the Ministry of Home Affairs (MOHA) proposed a discourse that governor is no longer elected directly by the people, but returned as at the first election, which is elected by the Provincial Parliament. The discourse is arranged in the plan of law which is part of the Election Law revision number 32 of 2004 about Regional Government.

The purpose of research is for determining perceptions elite political parties in Lampung about discourse of governor election by provincial parliament. The formulation of this research is how about perceptions of political parties elite in Lampung about discourse of governor election by provincial parliament.

Type of research used in this research is descriptive research with approach critical discourse analysis. This study aims to create a systematical, factual, sharp, and accurate description about the facts that are being studied by exposing the activities, views, and identities based on language used in the discourse.

The results obtained are that six of eleven political parties elite are represented by the Democratic Party, the Golkar Party, PAN, Hanura, PKB, and PKPB, expressing agreement to the discourse of the governor election By provincial parliament. While the Democratic Party of Struggle (PDI-P), PKS, Gerindra and PPP claim to reject the discourse. While the PDK claimed neutrality about the discourse, because it does not have the political power in the House of Representatives.

Keywords: Perceptions, Political Parties Elite, Provincial Parliament.